

MENGUKUR KESEJAHTERAAN

Hana Nika Rustia

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI

Naskah diterima: 21 Juli 2011

Naskah diterbitkan: 22 Desember 2012

- Judul Buku : Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?
Penulis : Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fittoussi
Penerjemah : Mutiara Arumsari, Fitri Bintang Timur
Penerbit : Marjin Kiri
Tahun: : 2011, cetakan I
Tebal: : 180 + XXVIII halaman

Pendahuluan

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indeks tentang *output* perekonomian keseluruhan suatu negara—hitungan tentang, antara lain, hasil produksi pabrik, panen petani, penjualan ritel, dan belanja konstruksi. Semua hitungan ini biasanya dilakukan dalam rentang waktu tertentu, misal setahun. Inilah angka yang kemudian berfungsi memadatkan luasnya perekonomian nasional ke dalam satu data tunggal dengan densitas yang luar biasa besar. Anggapan umum tentang PDB adalah bahwa semakin besar angkanya, semakin makmur negeri itu dan warganya. Padahal tidak demikian kenyataannya. Selama beberapa dekade, para ahli mengkritisi ukuran tunggal ekonomi nasional ini—menyatakan bahwa ini adalah ukuran yang menyesatkan. Belakangan ini, tantangan terhadap PDB semakin kuat, terutama di Eropa dan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Menurut mereka, PDB bukan hanya gagal menggambarkan kesejahteraan nyata masyarakat, tapi juga melencengkan tujuan politik global ke arah pengejaran pertumbuhan ekonomi semata.

Buku dengan judul “Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?” adalah laporan yang berisi berbagai rekomendasi ekonomi Komisi khusus yang dibentuk oleh presiden Prancis, Nicolas Sarkozy. Pada 2008, Sarkozy yang merasa tidak nyaman dengan kondisi perekonomian masyarakat saat itu, meminta Joseph Stiglitz (*Columbia University*, peraih nobel ekonomi 2001), Amartya Sen (*Harvard University*, peraih nobel ekonomi 1998), dan Jean-Paul Fittoussi (*Institut d’Etudes Politiques de Paris*) untuk membentuk sebuah Komisi, yang kemudian disebut Komisi Pengukuran Kinerja Ekonomi dan Kemampuan Sosial (CMEPSP). Komisi ini bertugas untuk mengidentifikasi keterbatasan PDB sebagai indikator tunggal kinerja ekonomi dan kemajuan sosial, menemukan informasi-informasi apa saja yang mungkin relevan untuk

mengembangkan indikator-indikator baru yang lebih relevan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahapan awal, Komisi berhasil mengidentifikasi beberapa keterbatasan PDB untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti: (1) Ketika terjadi ketimpangan yang besar dalam masyarakat (dalam hal distribusi pendapatan), PDB atau indikator lainnya yang disajikan per kapita (per orang) tidak dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dalam masyarakat. Sebut saja ketika 20 (dua puluh) persen dari anggota kelompok mengalami kenaikan penghasilan sampai tiga kali lipat dari yang mereka peroleh saat ini, maka PDB akan meningkat, walaupun pada faktanya, sebut saja, 30 (tiga puluh) persen anggota kelompoknya dalam kuartil bawah berada dalam kondisi ‘menyedihkan’. Statistik yang di dasarkan pada nilai rata-rata (*mean*) gagal menangkap fenomena sosial di masyarakat. Dalam kasus seperti ini nilai tengah (*median*) lebih menggambarkan kondisi nyata masyarakat. (2) Perangkat statistik yang digunakan dalam perhitungan PDB juga gagal menangkap beberapa fenomena yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Komisi memberikan ilustrasi kemacetan lalu lintas meningkatkan nilai PDB karena konsumsi bahan bakar yang lebih banyak. Lebih lanjut lagi, jika warga peduli dengan polusi suara, pencemaran udara, dan sampai pada perubahan iklim, maka pengukuran statistik yang menafikan faktor-faktor ini jelas gagal dalam menangkap ‘kesejahteraan’ yang sesungguhnya. Kemudian, (3) penyajian fakta-fakta statistik kerap kali menimbulkan salah penafsiran tentang *trend* fenomena ekonomi. Sebagai contoh PDB terlampaui dianggunkan, padahal Produk Nasional Bersih (PNB) yang memperhitungkan faktor depresiasi mungkin lebih relevan.

Selain itu, fakta bahwa PDB merupakan satuan yang tidak memadai untuk mengukur tingkat kesejahteraan dari waktu ke waktu, terutama yang berkaitan dengan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial menjadikan Komisi memiliki tugas pokok untuk mengurai keterbatasan-keterbatasan yang ada saat ini. Faktor-faktor tersebut lebih banyak disebut sebagai aspek keberlanjutan (*sustainability*)

Laporan Komisi ini membedakan antara penilaian kesejahteraan masa kini dan penilaian atas keberlanjutan. Yang pertama lebih terkait dengan sumber daya ekonomi, seperti pendapatan dan aspek-aspek non-ekonomi manusia (apa yang mereka lakukan, rasakan, serta lingkungan hidup yang mereka tinggali). Sedangkan kesejahteraan yang berkelanjutan didasarkan pada pertanyaan: “Apakah taraf kesejahteraan yang ada sekarang dapat diwariskan pada generasi berikutnya?”. Kemampuan untuk mewariskan kesejahteraan yang ada sekarang sangat tergantung pada kelangsungan dan keberlanjutan cadangan kapital manusia sendiri (lingkungan hidup, fisik, manusia, dan sosial).

Isu-Isu Klasik PDB

Terhadap isu-isu klasik PDB, seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, beberapa hal yang direkomendasikan oleh komisi adalah:

1) Perhatikan pendapatan dan konsumsi alih alih produksi.

Produk Domestik Bruto (PDB), sebagai ukuran aktivitas ekonomi yang paling banyak digunakan, sering dirancukan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi, walaupun pada dasarnya PDB tidak lebih hanya pengukuran produksi pasar. Penyalahgunaan PDB

dapat menghasilkan indikator kesejahteraan yang menyesatkan, yang berujung pada pengambilan kebijakan yang tidak tepat. Komisi percaya bahwa standar hidup lebih banyak dipengaruhi oleh konsumsi dan pendapatan dibandingkan dengan produksi semata. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa produksi dapat terus meningkat nilainya disaat pendapatan dan konsumsi masyarakat menurun, begitu juga sebaliknya.

2) Perhitungkan pendapatan dan konsumsi bersama-sama dengan kekayaan.

Pentingnya pendapatan dan konsumsi dalam mengukur standar hidup mesti dilengkapi dengan informasi mengenai kekayaan. Komisi mengandaikan dengan contoh sederhana yang ada di perusahaan. Indikator utama sebuah perusahaan adalah neraca keuangan. Hal ini juga seharusnya berlaku untuk perekonomian secara keseluruhan. Neraca ini meliputi aset (modal fisik, modal manusia, sumber daya alam dan sosial) serta tanggungan (hutang). Ide mengenai neraca keuangan suatu negara bukanlah hal yang baru, namun yang mesti diteliti lebih lanjut adalah bagaimana melakukan uji ketahanan (*stress test*) terhadap neraca ini dengan memberikan penilaian-penilaian alternatif ketika harga pasar untuk aset yang ada tidak tersedia. Pengukuran akan kekayaan merupakan hal yang sangat penting untuk menilai keberlanjutan. Keberlanjutan ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar aset yang akan diwariskan untuk generasi selanjutnya.

3) Tekankan sudut pandang rumah tangga.

Komisi menemukan bahwa standar kehidupan material masyarakatan dapat diamati lebih baik jika informasi pendapatan dan konsumsi rumah tangga tersedia lebih lengkap. Kenyataan ini didapatkan dari beberapa contoh negara-negara anggota OECD yang menunjukkan *trend* kenaikan yang berbeda antara PDB ril dan pendapatan ril rumah tangga. Sudut pandang rumah tangga melibatkan penghitungan kaitan antar sektor, seperti pajak yang dibayar ke negara, tunjangan sosial yang diberikan negara, serta bunga atas kredit rumah tangga yang masuk ke perusahaan-perusahaan finansial.

4) Beri penekanan yang lebih besar pada distribusi pendapatan, konsumsi dan kekayaan.

Jika tiga poin rekomendasi sebelumnya memberikan penekanan pada pendapatan, konsumsi serta kekayaan yang dititikberatkan pada lingkup rumah tangga, maka rekomendasi selanjutnya yang penting adalah distribusi ketiga besaran tersebut. Nilai pendapatan, konsumsi, dan kekayaan rata-rata merupakan hitungan yang sering dipakai namun tidak memberikan gambaran yang tepat tentang standar hidup. Misalnya kenaikan pendapatan rata-rata anggota kelompok yang tidak terjadi merata yang menyebabkan kondisi beberapa rumah tangga lebih buruk dibanding yang lain. Oleh karena itu, pengukuran mengenai pendapatan, konsumsi dan kekayaan perlu dibarengi dengan pengukuran distribusinya.

5) Perluas pengukuran pendapatan pada aktivitas non-pasar. Perubahan-perubahan signifikan tentang bagaimana masyarakat mengelola rumah tangga telah menyebabkan beberapa jasa yang awalnya diterima dari anggota keluarga yang lain, kini dibeli dari pasar. Dalam sudut pandang ekonomi nasional, hal ini akan terlihat sebagai kenaikan pendapatan, padahal fenomena ini hanya menunjukkan peralihan ekonomi non-pasar ke pasar. Fakta kecil ini merupakan bagian kecil dari layanan yang diproduksi rumah tangga untuk diri mereka

sendiri tidak masuk dalam hitungan kesejahteraan versi PDB, walaupun mereka mewakili salah satu aspek penting dalam ekonomi. Komisi merekomendasikan untuk melakukan usaha-usaha lanjutan untuk memperhitungkan sudut pandang *non*-pasar ini. Hal tersebut dapat diawali dengan penelitian tentang bagaimana masyarakat menghabiskan waktu luangnya? (perlu juga dibandingkan antar negara dalam rentang waktu tertentu).

Kualitas Hidup

Kualitas hidup merupakan konsep yang lebih luas daripada produksi ekonomi dan standar hidup. Konsep ini meliputi semua faktor yang memengaruhi apa yang kita hargai dalam hidup ini, melampaui sisi materialnya. Dengan kata lain, ia mencakup semua faktor, termasuk yang tidak diperdagangkan di pasar dan tidak dihitung dalam statistik moneter, yang membuat hidup kita berharga. Meskipun baru-baru ini banyak aspek-aspek tambahan yang dimasukkan dalam hitungan ekonomi konvensional dengan tujuan untuk menggambarkan kualitas hidup masyarakat, namun indikator-indikator tambahan tersebut masih memiliki banyak kekurangan. Indikator-indikator lainnya (selain PDB) punya peran penting dalam pengukuran kemajuan sosial. Beberapa diantaranya bahkan mampu untuk menghasilkan pengukuran akurat tentang beberapa bagian dari kualitas hidup manusia. Ukuran-ukuran yang ada tersebut, sekalipun tidak mampu untuk menggantikan pengukuran konvensional, dapat memperkaya ranah diskusi dalam bidang ini. Perihal kualitas hidup, Komisi memberikan beberapa rekomendasi seperti berikut:

- 1) Mengukur kesejahteraan subyektif menyediakan informasi kunci tentang kualitas hidup masyarakat.

Dalam survey-survey yang dilakukan, Komisi menyarankan semua biro statistik untuk memasukkan sejumlah pertanyaan yang dapat menangkap evaluasi orang atas hidupnya, berbagai pengalaman hedonis, dan prioritas-prioritas hidup mereka. Kesejahteraan subyektif mencakup bermacam aspek berbeda; evaluasi kognitif kehidupan pribadi, emosi positif seperti bahagia dan bangga, serta emosi negatif seperti sakit dan kekhawatiran. Pengukuran untuk berbagai aspek tersebut harus dilakukan secara terpisah untuk memberikan gambaran komprehensif kehidupan masyarakat. Pengukuran kuantitatif atas obyek-obyek subyektif ini menguntungkan karena memberikan informasi penting tentang kualitas hidup masyarakat melebihi pendapatan dan kondisi materialnya.

- 2) Kualitas hidup juga bergantung pada kondisi obyektif dan peluang masyarakat.

Komisi menyarankan untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pengukuran pada bidang-bidang: kesehatan, pendidikan, aktivitas pribadi (termasuk hak akan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak), hak suara politik, hubungan sosial, kondisi lingkungan, dan keamanan masyarakat. Pengukuran pada bidang-bidang ini perlu dilakukan secara subyektif dan obyektif. Komisi menyimpulkan bahwa tantangan pada bagian ini adalah bagaimana kita dapat mengidentifikasi kesenjangan informasi yang kini tersedia, dan mencurahkan segala kemampuan statistik untuk menghasilkan pengukuran yang dapat dipercaya.

- 3) Indikator-indikator kualitas hidup dalam segenap dimensinya harus mengukur kesenjangan secara komprehensif.

Isu mengenai kesenjangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pembicaraan mengenai kualitas hidup. Pengukuran yang dilakukan secara terpisah pada setiap indikator kualitas hidup tersebut bertujuan menekankan bahwa semua indikator adalah penting tanpa memberikan prioritas lebih yang satu atas lainnya. Komisi merekomendasikan untuk melakukan penelitian tentang ketimpangan yang terjadi antar masyarakat, antar kelompok sosio-ekonomi, antar gender, dan antar generasi.

- 4) Survei harus dirancang untuk mengkaji kaitan antara berbagai domain kualitas hidup bagi setiap orang, dan informasi ini harus digunakan dalam perancangan kebijakan diberbagai bidang.

Komisi menemukan bahwa mengkaji kaitan antar beberapa domain kualitas hidup adalah hal yang penting untuk dilakukan, seperti bagaimana satu domain mempengaruhi domain kualitas hidup yang lainnya, dan bagaimana perkembangannya tersebut mempengaruhi pendapatan secara keseluruhan. Dampak dari rendahnya kualitas hidup dalam pelbagai dimensi jauh melebihi dampak masing-masing domain jika diakumulasikan. Untuk mengembangkan pengukuran terhadap dampak kumulatif ini diperlukan informasi mengenai distribusi gabungan domain- domain paling dominan yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Menurut Komisi, hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan pertanyaan-pertanyaan standar ke semua survei yang ada, yang memungkinkan untuk melakukan pengelompokan responden berdasarkan ciri-ciri tertentu. Selanjutnya, sangatlah penting untuk mempertimbangkan interaksi antar domain ini dalam merancang kebijakan umum.

- 5) Biro-biro statistik harus menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menghitung secara agregat pelbagai dimensi kualitas hidup, dan memungkinkan tersusunnya indeks-indeks skala yang berbeda.

Meskipun komisi meyakini bahwa untuk mengkaji kualitas hidup diperlukan pengukuran yang majemuk, namun munculnya tuntutan untuk mengembangkan skala tunggal tidak dapat dihindari. Beberapa pengukuran skala tunggal untuk menggambarkan kualitas hidup mungkin saja untuk dihasilkan, yang sangat tergantung pada pertanyaan yang dituju dan pendekatan yang digunakan. Beberapa diantaranya bahkan telah digunakan; seperti kepuasan tinggal di suatu negara dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup.

Jika pada dua bahasan awal Komisi telah membahas tentang pengukuran moneter, baik dimensi-dimensi yang diringkas dalam unit moneter maupun dimensi-dimensi kualitas hidup yang kurang disepakati untuk menjadi unit moneter, maka pada bagian akhir Komisi mengangkat isu keberlanjutan (*sustainability*) terhadap kesejahteraan itu sendiri. Menurut komisi, keberlanjutan menantang manusia untuk memberikan jawaban pada pertanyaan: Apakah kesejahteraan yang ada saat ini dapat dinikmati dimasa akan datang? Berapa lama? Dan sebagainya. Pengukuran keberlanjutan bukan lagi hanya soal pengukuran kekinian, tetapi memprediksi masa depan.

Ide awal tentang keberlanjutan ini pernah diajukan oleh beberapa ahli ekonomi sebelumnya, seperti dari kajian Nordhaus dan Tobin yang sangat berpengaruh: “*Sustainability measure of economic welfare*” pada tahun 1970-an, dan laporan kuat Brundtland (1987) serta Rio Summit (1990-an). Menurut Komisi, kajian serta laporan tersebut, pada dasarnya, gagal dalam menangkap perbedaan kesejahteraan masa kini dan keberlanjutannya. Banyak dari mereka mencoba mengukur semua besaran kesejahteraan dan keberlanjutan dalam satu angkat tunggal. Sedangkan Komisi meyakini bahwa untuk mengukur kedua hal tersebut diperlukan pengukuran terpisah. Beberapa rekomendasi penting komisi tentang isu keberlanjutan adalah sebagai berikut:

1) Pengukuran keberlanjutan membutuhkan subdasbor yang indikator-indikatornya teridentifikasi dengan jelas dari dasbor global yang direkomendasikan oleh Komisi.

Pengukuran keberlanjutan merupakan pelengkap dari pengukuran kinerja dan kesejahteraan ekonomi saat ini, dan harus dipisahkan menurut Komisi. Rekomendasi ini mungkin terdengar aneh, namun perlu untuk ditekankan karena Komisi menemukan bahwa beberapa pendekatan yang ada gagal untuk memberikan informasi ril. Malah pada puncaknya, mereka berusaha untuk menggabungkan kedua dimensi ini dalam satu indikator pengukuran. Komisi memberikan analogi sederhana: ketika menyetir mobil, pengukuran (meteran) yang memadukan kecepatan kendaraan dan sisa bahan bakar ke dalam satu angkat tunggal tidak memberikan informasi yang dibutuhkan pengemudi. Kedua informasi tersebut sama pentingnya dan perlu untuk ditampilkan secara terpisah.

2) Ciri khas semua komponen di subdasbor ini adalah untuk memberi informasi mengenai variasi-variasi *stock* yang mendasari kesejahteraan manusia.

Indikator indikator yang memberikan informasi mengenai perubahan jumlah berbagai macam faktor penting untuk kesejahteraan manusia di masa depan adalah hal yang penting untuk mengukur keberlanjutan. Menurut Komisi, jika premis awal tersebut disepakati, maka berarti pendekatan keberlanjutan erat kaitannya dengan pelestarian dan peningkatan *stock* (cadangan): sumber daya alam, modal manusia, sosial, dan fisik. Lebih lanjut, Komisi menemukan bahwa pendekatan apapun yang diajukan, yang hanya mencakup sebagian hal tersebut, tidak menawarkan pandangan komprehensif tentang keberlanjutan.

Jika pendekatan yang direkomendasikan Komisi dilakukan, maka kesalahpahaman mengenai pesan yang terdapat dalam indikator-indikator pendapatan nasional dapat dihindari. Sebagai contohnya, Komisi menggambarkan kritik pada PDB yang menggolongkan bencana alam sebagai berkah pada perekonomian karena tambahan aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh renovasi. Pada pendekatan stok (cadangan), ambiguitas tersebut dihilangkan. Bencana alam akan dihitung sebagai depresiasi atas modal alam dan fisik. Dalam pendekatan ini, kenaikan apapun dalam ekonomi akan bernilai positif jika dapat memulihkan tingkat awal *stock* (cadangan) modal.

3) Indeks moneter atas keberlanjutan mempunyai tempat dalam dasbor seperti ini, namun dalam konteks kondisi sekarang, fokus tetap diarahkan pada aspek ekonomi berkelanjutan itu sendiri.

Ada dua pendapat besar tentang pendekatan keberlanjutan *stock* (cadangan). *Pertama*, mencermati variasi masing masing stok secara terpisah, menjaganya agar tidak turun melebihi batas ‘aman’ untuk keberlanjutan. *Kedua*, pendapat yang disebut

adjusted savings (kekayaan dalam arti luas). Ide dari pendapat yang kedua ini adalah mencari equivalensi moneter untuk semua aset yang ada. Banyak keterbatasan dalam pendapat ini. Selain tidak tersedianya semua harga aset di pasar, tidak ada jaminan bahwa nilai pasar (untuk aset yang ada nilai pasarnya) mencerminkan kepentingan aset yang berbeda-beda bagi kesejahteraan dimasa depan.

Kedua pendapat tersebut, mengisyaratkan Komisi, bahwa kita harus menggunakan pendekatan yang lebih sederhana; *adjusted net savings*. Pendapat yang terakhir berfokus pada aset yang sudah memiliki teknik valuasi yang teruji, misalnya modal fisik, manusia, dana beberapa sumber daya yang diperdagangkan di pasar. ‘Penghijauan’ secara terus menerus pada pendekatan ini beserta interaksi antara lingkungan dan perekonomian merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan.

4) Aspek-aspek lingkungan hidup dari keberlanjutan layak mendapatkan kajian terpisah berdasarkan serangkaian indikator-indikator yang dipilih dengan cermat.

Ada beberapa alasan yang melandasi Komisi merekomendasikan penghitungan terpisah antara aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan. *Pertama*, adanya keterbatasan moneter untuk menguantifikasi kerusakan lingkungan bukan berarti bahwa penghitungan kerusakan lingkungan tidak diperlukan lagi. Dengan kata lain, kita belum mampu mengontruksi nilai moneter untuk *environmental goods* yang ada pada tataran makro untuk bisa dibandingkan dengan harga pasar aset-aset lainnya. *Kedua*, isu-isu lingkungan kerap terkait dengan barang publik yang bersifat global, seperti pada kasus iklim.

Kompromi pragmatis yang diambil oleh Komisi dalam hal ini adalah menyarankan sebuah dasbor kecil, yang bersumber pada pendekatan stok atas isu keberlanjutan, yang memadukan indikator yang diturunkan dari pendekatan *extended wealth* (pendekatan keberlanjutan yang berfokus pada tataran negara daripada global) yang dikembangkan dengan tingkat pengetahuan yang ada dengan seperangkat indikator fisik lain yang dipilih dengan baik, yang akan berfokus pada keberlanjutan lingkungan yang penting dimasa depan.

Penutup

Akhirnya, harus dikatakan bahwa dari segi substansi, buku ini penting untuk dibaca oleh para pembuat kebijakan, pemimpin politik, komunitas akademik; terutama para ahli statistik dan pengguna intensif dana statistik, serta organisasi-organisasi masyarakat sipil baik yang merupakan pengguna maupun penghasil statistik. Bahasan paling ‘panas’ bidang ekonomi dalam isu kesejahteraan masyarakat dihadirkan dalam buku ini. Kekuatan utama buku ini tentu terdapat pada penulisnya yang merupakan ekonom-ekonom nomor satu dunia dengan berbagai penghargaan yang mereka terima. Pemahaman ekonomi makro mereka yang sangat mendalam akan membuat mata pembaca terbuka tentang bagaimana PDB selama ini sering disalahgunakan oleh segelintir penguasa dalam pengambilan kebijakan dan juga pernyataan-pernyataan politik mereka.

Walaupun begitu, tidak berarti buku hasil terjemahan ini terlepas dari kekurangan. Kekurangan tersebut diantaranya adalah adanya kesalahan ketik (hal. 112), dan beberapa istilah asing yang tidak diberikan terjemahan versi penerjemah (hal 111,

hal. 118). Padahal penting bagi pembaca untuk mengerti apa maksud beberapa istilah tersebut dalam Bahasa Indonesia. Kemudian, bahasa penerjemah yang terkesan ‘kaku’ dalam menerjemahkan, membuat buku ini sedikit sulit untuk dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Chamsyah, Bachtiar. 2009. “Reinverting Pembangunan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia.” Jakarta: Trisakti University Press.
- Gilarso, Prs. T. 2004. “Pengantar Ilmu Ekonomi Makro.” Yogyakarta: Kanisius.
- Siahaan, N. H. T. 2004. “Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan.” Jakarta: Erlangga.